

## PEMERINTAHAN DAERAH

1999

UU NO. 22, LN 1999/NO. 60, TLN NO. 3839, LL SETKAB : 43 HLM

## UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

**ABSTRAK:** -Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam maupun di luar negeri, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, undang-undang mengenai pemerintahan di daerah yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah demikian pula undang-undang mengenai pemerintahan desa tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945. Untuk itu perlu ditetapkan mengenai undang-undang pemerintahan daerah yang baru.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah :UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1); TAP MPR NO.X/MPR/ 1998; TAP MPR No.XI/MPR/1998; TAP MPR No.XV/ MPR/1998; UU No. 4 TAHUN 1999.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang :Pengertian mengenai Pemerintah Pusat, Wilayah Administrasi, Instansi Vertikal, Pejabat yang berwenang, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Kawasan Pedesaan; Pembagian daerah; Pembentukan dan Susunan Daerah; Kewenangan Daerah; Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; Kepegawaian Daerah; Keuangan Daerah; Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan; Kawasan Perkotaan; Pembinaan dan Pengawasan; Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; Pembentukan Polisi Pamong Praja; Sebutan Propinsi Dati I, Kabupaten Dati II, Kotamadya Dati II berubah menjadi Propinsi, Kabupaten dan Kota.

**CATATAN:** - Ibukota Negara RI diatur dengan undang-undang tersendiri;

- Penyelenggaraan Otonomi Khusus ditetapkan dengan undang-undang;
- Organisasi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Selama belum ada peraturan pelaksanaan undang-undang ini, peraturan yang ada masih tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
- Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku : UU No.5 Tahun 1974, UU No.5 Tahun 1979;
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1999
- Penjelasan 27 hlm

